



ANALISIS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kota Palangka Raya
Tahun 2015-2019





ANALISIS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kota Palangka Raya
Tahun 2015-2019



ANALISIS
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2015-2019

Ukuran Buku : 21 X 29,7 CM
Jumlah Halaman: xi+61

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kami dapat menyusun dan menerbitkan publikasi “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019”.

Publikasi ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara makro keberhasilan yang telah dicapai oleh Kota Palangka Raya dalam bidang pembangunan manusia melalui beberapa komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Semoga kehadiran publikasi ini dapat menjawab kebutuhan dari konsumen data baik dari pemerintah maupun dari swasta, terutama data/ informasi dalam aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan konteks pembangunan manusia di Kota Palangka Raya.

Meskipun penyusunan publikasi ini telah dilakukan secara maksimal, tetapi masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang ada sehingga saran dan kritik yang membangun sangatlah kami perlukan untuk keperluan perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penyusunan dan penerbitan publikasi ini. Akhirnya, semoga Allah SWT tetap memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mengemban tugas mulia pembangunan Kota Palangka Raya. Aamiin.

Palangka Raya, Juni 2020

Kepala Bappedalitbang
Kota Palangka Raya,


Ir. Harry Maihadi
NIP. 19630504 199303 1 020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Palangka Raya,

Agie, SH, M.Hum.
NIP. 19631011 198403 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sistematika.....	5
 BAB II. METODOLOGI	 7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep Indeks Pembangunan Manusia	9
2.3 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia.....	10
2.4 Perubahan Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia.....	11
2.5 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia.....	14
2.6 Pencapaian Pembangunan Manusia	18
 BAB III. KONDISI SOSIAL EKONOMI	 19
3.1 Kependudukan	21
3.2 Kesehatan	22
3.3 Pendidikan	23
3.4 Ketenagakerjaan	24
3.5 Perekonomian	26
3.6 Pengeluaran Rumah Tangga	27



BAB IV. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA	29
4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	31
4.2 Perkembangan Komponen IPM dan Penghitungan IPM	34
4.3 Perkembangan Dimensi Umur Panjang dan Sehat	35
4.4 Perkembangan Dimensi Pengetahuan	37
4.5 Perkembangan Dimensi Hidup Layak	43
4.6 Disparitas Pengeluaran Perkapita	46
 BAB IV. PENUTUP	 49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Dimensi IPM Antara BPS dan UNDP.....	13
2.2 Daftar Paket Komoditas yang Digunakan Dalam Penghitungan PPP.....	16
2.3 Indikator Minimum dan Maksimum Komponen IPM.....	17
3.1 Persentase Penduduk Alami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk Palangka Raya, Tahun 2018-2019	22
3.2 Tiga Penyakit Terbanyak dan Kasus Kematian Penduduk Palangka Raya Tahun 2018-2019	22
3.3 Banyaknya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019	23
3.4 Persentase Penduduk Palangka Raya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018-2019	24
3.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah di Palangka Raya Tahun 2018-2019	24
3.6 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Palangka Raya Tahun 2018-2019	25
3.7 Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Pekerja Informal menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Palangka Raya Tahun 2019 (Rupiah)	26
3.8 Persentase Penduduk Palangka Raya menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2017-2019	28
4.1 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tahapan Perubahan Metodologi Penghitungan IPM.....	12
2.2 Perbandingan Metode Lama dan Metode Penghitungan IPM Antara BPS dan UNDP menurut Dimensi IPM.....	13
3.1 Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2019	21
4.1 IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019	31
4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia, Tahun 2015-2019 (Persen)	32
4.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2019	33
4.4 Angka Harapan Hidup Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2015-2019 (Tahun)	36
4.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Tahun).....	37
4.6 Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional, Tahun 2015-2019 (Tahun)	38
4.7 RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah,Tahun 2019 (Tahun).....	39
4.8 Perkembangan RLS dan HLS Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019	41
4.9 Angka HLS Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional, Tahun 2015-2019 (Tahun)	42
4.10 HLS Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2019 (Tahun)	43
4.11 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia, Tahun 2015-2019 (Persen)	45
4.12 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2019 (Ribu Rp)	46
4.13 Perkembangan Indeks Williamson di Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun).....	55
Lampiran 2. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun).....	56
Lampiran 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun).....	57
Lampiran 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (ribu Rupiah).....	58
Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun).....	59
Lampiran 6. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Miliar)	60
Lampiran 7. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen).....	61

Apa Manfaat IPM ?



Ukuran Keberhasilan

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)

Target Pembangunan

IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI

Dana Alokasi Umum

IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Insentif Daerah

Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID)




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan selama ini lebih menekankan pada bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Metode ini di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak mampu menekan angka pengangguran serta mengatasi kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa sukses dan tidaknya pembangunan di suatu daerah tidak hanya cukup diukur dengan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan perubahan positif dalam bidang sosial, politik, budaya dan lingkungan serta fokus pada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

Pertanyaan yang sering muncul dari para pengambil kebijakan baik di daerah maupun di pusat adalah, Mengapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran juga tinggi? Jawabannya adalah, pertumbuhan ekonomi sering tidak diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan yang sesuai (*Growth without employment*). Jika kita perhatikan lebih lanjut, kategori apa saja yang memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kita akan mendapatkan, bahwa sektor yang berkembang di Indonesia adalah sektor-sektor yang modern seperti perbankan, sektor finansial, teknologi informasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Sektor ini membutuhkan SDM yang berkualitas dan mempunyai pendidikan serta keterampilan yang tinggi. Jika dilihat lebih dalam lagi, SDM yang tersedia di Indonesia adalah SDM dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak punya keterampilan, serta sedikit yang mampu menguasai bahasa asing. Itulah penyebabnya mengapa angka pengangguran masih cukup tinggi di Indonesia.



Penduduk Indonesia yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kualitas yang andal. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Akhir-akhir ini pembicaraan tentang sumber daya manusia semakin terdengar. Hal ini tidak lepas dari kesadaran bersama bahwa manusia tidak hanya sebagai penikmat pembangunan. Di samping itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa bergantung pada sumber daya alam.

Dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai, Pembangunan Manusia juga merupakan sebuah model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk. Lebih rinci hal tersebut diuraikan menjadi :

1. Tentang Penduduk, berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
2. Untuk Penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Oleh Penduduk, berupa upaya untuk memberdayakan (*empowerment*) penduduk dengan cara ikut serta berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Manusia merupakan sumber daya sesungguhnya yang akan melakukan pembangunan dan juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Meskipun pembangunan ekonomi dipandang lebih utama daripada pembangunan manusia, namun pembangunan manusia tidak dapat diabaikan.

Pembangunan manusia yang berhasil hanya dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan peluang untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. UNDP sejak tahun 1990 menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu daerah atau negara dalam pembangunan manusia.

1.2 Tujuan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah.

Penyusunan IPM ini diharapkan mampu menyajikan pencapaian dan kinerja pembangunan manusia sesuai perspektif UNDP di Kota Palangka Raya selama kurun waktu 2015-2019. Selain itu juga akan dilihat bagaimana pencapaian pembangunan manusia di Kota Palangka Raya tersebut dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Sistematika

Analisis ini akan dibahas dalam lima bab mulai dari Pendahuluan hingga Kesimpulan dengan susunan sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN, akan menguraikan mengenai latar belakang dan tujuan analisis serta pengertian Indeks Pembangunan Manusia secara umum.
2. Bab II METODOLOGI, membahas mengenai sumber data, konsep-konsep yang digunakan, serta metode penghitungan dan analisis.
3. Bab III FASILITAS DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI, membahas mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perekonomian di Kota Palangka Raya.
4. Bab IV PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA, membahas mengenai perkembangan IPM beserta perkembangan dimensi/ komponen IPM.
5. Bab V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

DIMENSI IPM

Dimensi Umur panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)



Dimensi Pengetahuan

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

- **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25+)**

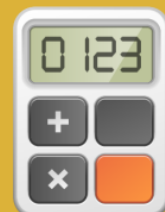


Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan

PENGHITUNGAN IPM

Agregasi Indeks
Rata-Rata Ukur / Geometrik



BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data


Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah hasil berbagai survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Adapun variabel yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah :

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 – Proyeksi Penduduk)
2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Suvei Sosial Ekonomi Nasional-Susenas).
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan rupiah.

2.2 Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia yang didefinisikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, dan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh



pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi.


Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama apabila disajikan tersendiri, yang hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu daerah. Namun demikian, manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas apabila dilakukan perbandingan antar waktu dan antar daerah, sehingga posisi relatif suatu daerah terhadap daerah yang lain dapat diketahui serta kemajuan/pencapaian antar waktu di suatu daerah dan perbandingannya dengan pencapaian daerah lain dapat dibahas.

2.3 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari IPM pada dasarnya adalah untuk memperlihatkan apakah pembangunan di suatu daerah sudah mengakomodasikan partisipasi seluruh penduduk dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam pengertian ini, penduduk tidak lagi dipandang sebagai objek atau sasaran pembangunan saja, tetapi dilibatkan dalam proses pembangunan sebagai subjek yang ikut mengambil keputusan. Dalam terminologi pembangunan, hal itu dikenal sebagai *people centered development*.

Paradigma pembangunan manusia memandang pembangunan bukan tujuan, melainkan sebagai sarana (*means*) memperluas peluang melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli penduduk. IPM sebagai alat ukur, dengan demikian dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, yang dalam bahasa pemerintahan berarti menilai kinerja dan peranan birokrasi dalam pencapaian menuju hidup layak.

Penghitungan IPM pertama kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990 untuk level provinsi dan tahun 1996 pada level kabupaten, yang dilakukan



setiap tiga tahun sekali. Sejak tahun 2004 penghitungan IPM dilakukan rutin setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk berbagai kepentingan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan antar wilayah/negara.
3. Sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. Salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI.

2.4 Perubahan Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

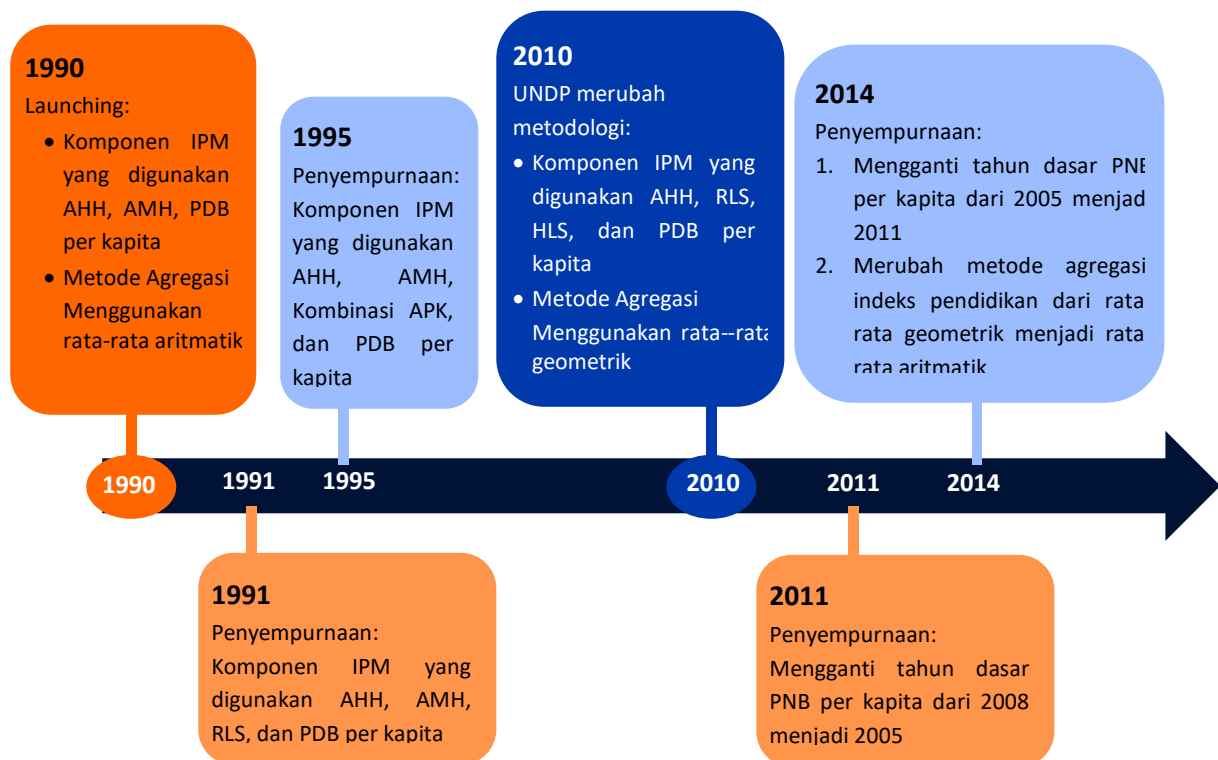
Selama dua puluh lima tahun terakhir sejak tahun 1990 di mana IPM pertama kali *launching*, telah dilakukan beberapa kali perubahan baik indikator maupun metode penghitungan bahkan penyempurnaan itu dimulai mulai tahun 1991 dilanjutkan tahun 1995, tahun 2010, tahun 2011, dan terakhir tahun 2014. Perubahan tersebut terus dilakukan dalam upaya agar menghasilkan indeks yang representatif sesuai dengan kondisi zaman dan perekonomian terkini.

Pada tahun 2016 adalah tahun BPS mengadaptasi perubahan metode penghitungan IPM 2015. UNDP sendiri sudah merubah metodologi sejak tahun 2010 dan direvisi tahun 2011 bahkan India dan Filipina telah memulai mengaplikasikan metode baru sejak tahun 2011. Adapun alasan dilakukan perubahan terhadap metodologi penghitungan IPM adalah:

1. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak sensitif dalam menggambarkan kualitas pendidikan mengingat AMH hampir mendekati 100 di semua daerah yang berarti hampir semua penduduk bisa baca tulis sehingga tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

2. PDB Perkapita tidak dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Gambar 2.1 Tahapan Perubahan Metodologi Penghitungan IPM



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup

AMH : Angka Melek Huruf

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

APK : Angka Partisipasi Kasar

HLS : Harapan Lama Sekolah

PNB : Produk Nasional Bruto

PDB : Produk Domestik Bruto

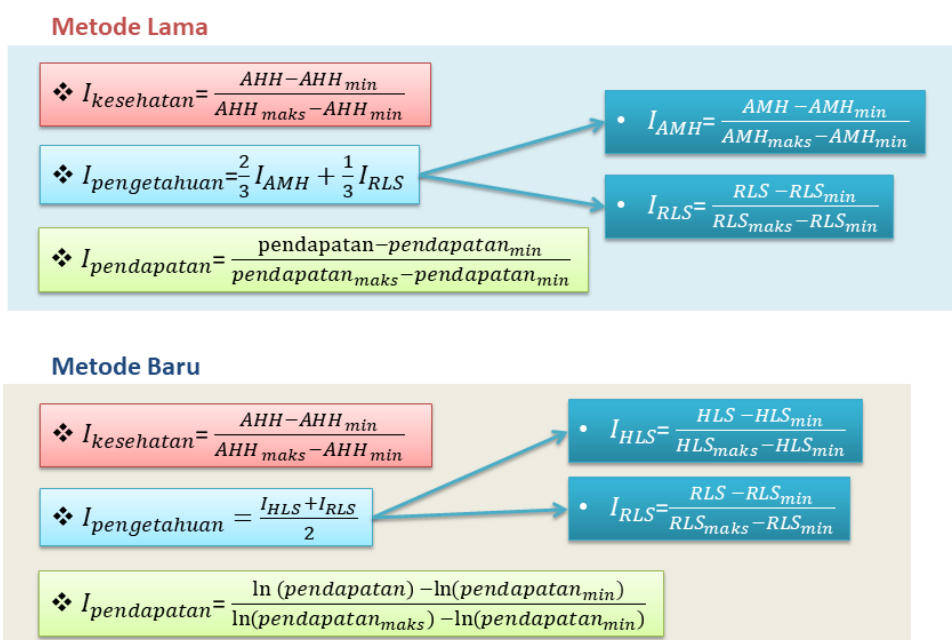
Sumber : BPS

Tabel 2.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Dimensi IPM Antara BPS dan UNDP

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS*
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf	1. Angka Melek Huruf	1. <i>Expected Years of Schooling</i>	1. <i>Expected Years of Schooling</i>
	2. Kombinasi APK	2. <i>Mean Years of Schooling</i>	2. <i>Mean Years of Schooling</i>	2. <i>Mean Years of Schooling</i>
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3} (I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pengetahuan}} + I_{\text{daya beli}})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{daya beli}}}$	

Sumber : BPS

Gambar 2.2 Perbandingan Metode Lama dan Metode Penghitungan IPM Antara BPS dan UNDP menurut Dimensi IPM



Sumber: BPS

2.5 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi kesehatan dihitung dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Di mana nilai minimum digunakan adalah 20 tahun dan nilai maksimum sebesar 85 tahun.

Indeks ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan. Indeks lamanya hidup dihitung dari perbandingan selisih antara angka harapan hidup dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dengan nilai minimum angka harapan hidup tersebut. Proses indeks kesehatan dirumuskan sebagai berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan :
 AHH_{min} : 20 tahun
 AHH_{maks} : 85 tahun

Angka Harapan Hidup dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dihitung dengan menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini menggambarkan kualitas pendidikan atau capaian pembangunan di bidang pendidikan di suatu wilayah.

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun keatas sesuai dengan kebijakan pemerintah

mengenai wajib belajar. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Diasumsikan juga bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Adapun sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan Susenas.

Proses penghitungan HLS dan RLS serta indeks pendidikan adalah sebagai berikut:

$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	<p>Keterangan :</p> <p>HLS_{min} : 0 tahun</p> <p>HLS_{maks} : 18 tahun</p> <p>RLS_{min} : 0 tahun dan</p> <p>RLS_{maks} : 15 tahun</p> <p>I : Indeks</p>
--	--

3. Dimensi Standar Hidup Layak

BPS menghitung IPM hingga level kabupaten, padahal tidak tersedia data PNB menurut kabupaten untuk menggunakan indikator seperti halnya UNDP. Oleh sebab itu digunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan dihitung dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*). Nilai ini dapat menggambarkan mengenai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Penghitungan rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dari data SUSENAS dan dibuat konstan/ riil dengan tahun dasar 2011=100. Dengan demikian dapat menggambarkan perkembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara riil.

Tabel 2.2 Daftar Paket Komoditas yang Digunakan Dalam Penghitungan PPP

Kelompok Makanan		KOMODITAS TERPILIH
		Kelompok Nonmakanan
Beras	Pepaya	Rumah sendiri/bebas sewa
Tepung terigu	Minyak kelapa	Rumah kontrak
Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	Rumah sewa
Kentang	Kelapa	Rumah dinas
Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	Listrik
Kembung	Teh	Air pam
Bandeng	Kopi	LPG
Mujair	Garam	Minyak tanah
Mas	Kecap	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)
Lele	Penyedap masakan/vetsin	Perlengkapan mandi
Ikan segar lainnya	Mie instan	Barang kecantikan
Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Daging ayam ras	Kue kering	Sabun cuci
Daging ayam kampung	Kue basah	Biaya rs pemerintah
Telur ayam ras	Makanan gorengan	Biaya rs swasta
Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	Puskesmas/pustu
Susu bubuk	Nasi campur/rames	Praktik dokter/poliklinik
Susu bubuk bayi	Nasi goreng	Spp
Bayam	Nasi putih	Bensin
Kangkung	Lontong/ketupat sayur	Transportasi/pengangkutan umum
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Pos dan telekomunikasi
Bawang merah	Sate/tongseng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi perempuan dewasa
Cabai merah	Makanan ringan anak	Pakaian jadi anak-anak
Cabai rawit	Ikang (goreng/bakar dll)	Alas kaki
Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	Minyak pelumas
Tempe	Makanan jadi lainnya	Meubelair
Jeruk	Air kemasan galon	Peralatan rumah tangga
Mangga	Minuman jadi lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Salak	Es lainnya	Alat-alat dapur/makan
Pisang ambon	Roko keretek filter	
Pisang raja	Roko keretek tanpa filter	
Pisang lainnya	Rokok putih	

Sumber : BPS

Proses penghitungan indeks pengeluaran per kapita yang disesuaikan dirumuskan sebagai berikut :

$$I_y = \frac{\ln(y) - \ln(y_{min})}{[\ln(y_{maks}) - \ln(y_{min})]}$$

Keterangan:

- y : Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
 y_{min} : Nilai minimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
 y_{maks} : Nilai maksimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

Daya beli minimum yang digunakan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu kabupaten Tolikara Provinsi Papua sebesar Rp 1.007.436,00 . Sedangkan daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga tahun 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025 sebesar Rp 26.572.352,00 .

Komoditas yang digunakan bertambah dari 27 komoditas di metode penghitungan sebelumnya, ditambah menjadi 96 komoditas yang terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.

4. Penghitungan IPM

Dalam metode penghitungan yang baru digunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran yang disesuaikan. Proses dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Diharapkan dengan metode penghitungan agregasi secara geometrik ini, dapat memperbaiki kelemahan pada metode aritmatik sebelumnya.

Tabel 2.3 Indikator Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Komponen	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita		100 (PPP U\$)	1 007 436 (Rp)	100 721 (PPP U\$)	26 572 352 (Rp)

Sumber : BPS

2.6 Pencapaian Pembangunan Manusia

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari nilai IPM yang diperoleh suatu daerah. IPM bernilai di antara 0-100, semakin tinggi nilai IPM menyatakan status pencapaian yang lebih tinggi. UNDP membagi nilai IPM menjadi tiga kriteria, yaitu:

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1. Rendah | : | IPM kurang dari 60, |
| 2. Sedang | : | IPM antara 60-69, |
| 3. Tinggi | : | IPM antara 70-79, |
| 4. Sangat Tinggi | : | IPM bernilai 80 atau lebih. |

Selain dari besarnya nilai IPM, capaian IPM juga dapat dilihat dari percepatan pertumbuhan IPM. Dengan percepatan yang lebih tinggi bukan tidak mungkin suatu daerah akan mengejar ketertinggalannya dari daerah yang lebih tinggi dengan mempertahankan *speed* atau kecepatannya dan bila memungkinkan melakukan upaya untuk meningkatkan lagi. Berikut adalah formula untuk percepatan pertumbuhan IPM :

$$g = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

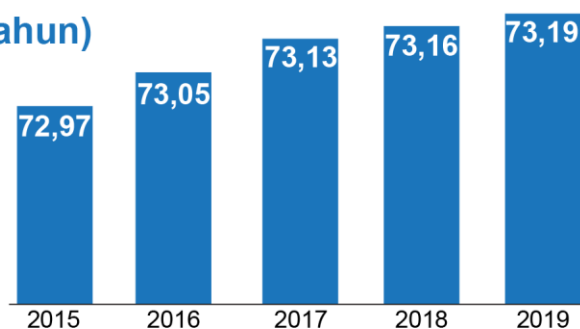
g : Pertumbuhan IPM

IPM_t : IPM tahun t

IPM_{t-1} : IPM tahun $t-1$

Umur Harapan Hidup Saat Lahir / UHH (tahun)

▶ Tahun 2019 tumbuh 0,54 persen

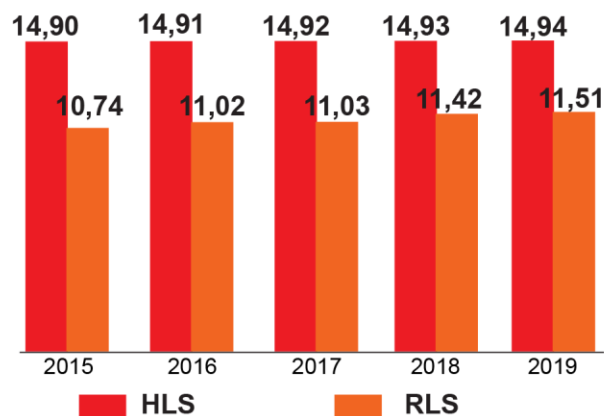


- Harapan Lama Sekolah / HLS (tahun)

▶ Tahun 2019 tumbuh 0,07 persen

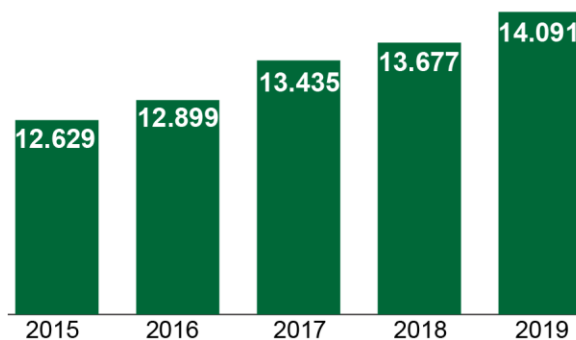
- Rata-Rata Lama Sekolah / RLS (tahun)

▶ Tahun 2019 tumbuh 0,79 persen



Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (ribu)

▶ Tahun 2019 tumbuh 3,03 persen



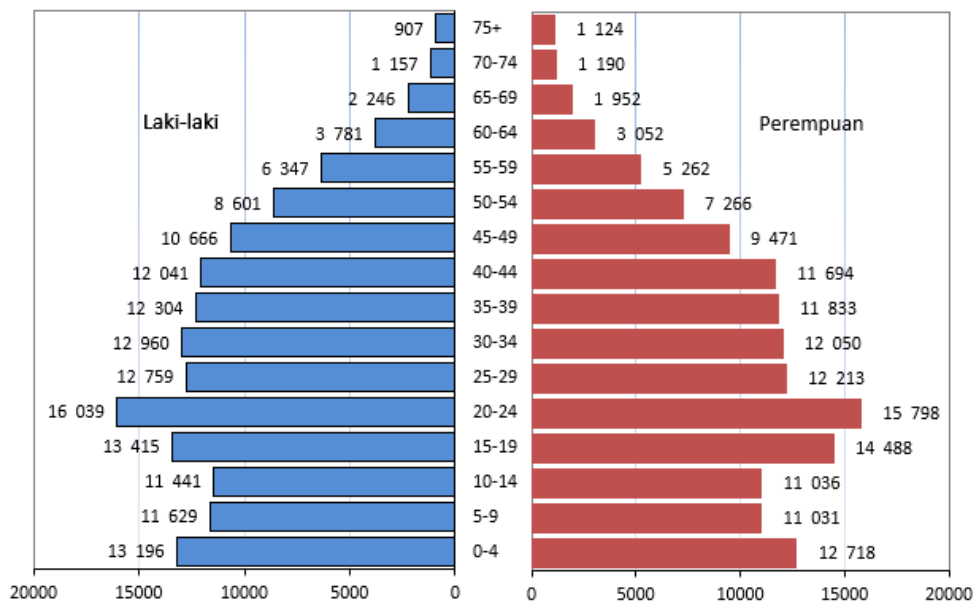
BAB III

FASILITAS DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI

3.1 Kependudukan

Berdasarkan proyeksi BPS atas dasar Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 291.667 jiwa, terdiri dari 149.489 laki-laki dan 142.178 perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 2.853,12 km² penambahan penduduk tersebut meningkatkan pula kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yaitu menjadi sebanyak 102 jiwa setiap satu km². Angka rasio jenis kelamin pada tahun 2019 sebesar 105,14. Artinya bahwa masih lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Angka tersebut mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 s.d 106 penduduk laki-laki.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2019



Piramida penduduk Kota Palangka Raya tergolong dalam piramida struktur penduduk muda. Kelompok umur 20-24 tahun mempunyai alas paling lebar. Artinya jumlah penduduk pada kelompok ini lebih banyak dibandingkan kelompok umur lainnya. Sebagaimana kita ketahui Kota Palangka Raya adalah tempat pilihan untuk menempuh kuliah bagi mahasiswa asal kabupaten di Kalimantan Tengah.

3.2 Kesehatan

Kesehatan identik dengan rendahnya keluhan sakit, sedangkan morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Beberapa keluhan kesehatan yang umumnya dialami oleh penduduk antara lain panas, batuk, pilek, asma/ napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain sebagainya.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Alami Keluhan Kesakitan dan Angka Kesakitan Penduduk Palangka Raya, Tahun 2018-2019

Tahun	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Penduduk Alami Keluhan Kesehatan (%)	26,20	32,48
Angka Kesakitan(%)	10,26	15,75

Sumber: Susenas 2019-2019 (diolah)

Pada tahun 2019 persentase angka kesakitan penduduk Kota Palangka Raya meningkat dari 10,26 persen pada tahun 2018 menjadi 15,75 persen. Hal ini turut dipengaruhi oleh bencana asap kebakaran yang dirasakan oleh warga Palangka Raya. Hal ini sebagaimana laporan yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya bahwa pada tahun 2019 terdapat tiga penyakit yang paling banyak di derita oleh penduduk Palangka Raya yaitu infeksi akut lain pada saluran nafas bagian atas (37.132 kasus), hipertensi esensial (16.688 kasus), dan Gastritis (5.960 kasus).

Tabel 3.2 Tiga Penyakit Terbanyak dan Kasus Kematian Penduduk Palangka Raya, Tahun 2018-2019

Tahun	2018	2019
(1)	(2)	(3)
3 Penyakit Terbanyak		
Infeksi Akut Lain pada Saluran Nafas Bagian Atas	27.199	37.132
Hipertensi Esensial	13.689	16.688
Gastritis	6.681	5.960
Kasus Kematian		
Ibu	4	4
Bayi	9	8
Balita	2	4

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

Sebagai sarana untuk berobat jalan bagi masyarakat, di Palangka Raya telah tersedia fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Pada tahun 2019 terdapat 9 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, 11 puskesmas, dan 24 puskesmas pembantu. Selain itu, kebera

Tabel 3.3. Banyaknya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019

Fasilitas/ Tenaga Kesehatan	2019
(1)	(2)
Fasilitas Kesehatan	
Rumah Sakit Umum	9
Rumah Sakit Bersalin	2
Puskesmas	11
Puskesmas Pembantu*	24
Tenaga Kesehatan	
Dokter	38
Perawat	115
Bidan	97
Farmasi	30
Ahli Gizi	21

3.3 Pendidikan

Hingga tahun 2019 terdapat 21,19 penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan minimal 9 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penduduk yang mampu mengikuti pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat mencapai 37,96 persen. Adapun penduduk yang memiliki ijazah diploma 1/2/3 sebesar 3,58 persen, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 sebesar 18,64 persen.

Melalui akses pendidikan pada penduduk usia sekolah dapat berarti bahwa semakin tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pada tahun 2019, capaian angka partisipasi sekolah penduduk berusia 7-12 tahun mencapai 99,97 persen, APS penduduk kelompok 13-15 tahun mencapai 91,65 persen, dan APS penduduk kelompok usia 16-18 Tahun hanya 79,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia, terdapat sebagian penduduk yang tidak melanjutkan pendidikannya. Hal ini karena sebagian penduduk tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Palangka Raya Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018-2019

Ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	5,54	5,43
SD/MI	13,07	13,20
SMP/MTs	22,39	21,19
SMA/MA	34,56	34,18
SMK/MAK	2,48	3,78
DI/DII	0,69	0,97
Akademi/DIII	3,46	2,61
DIV/S1/S2/S3	17,81	18,64
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2018-2019 (diolah)

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah di Palangka Raya Tahun 2018-2019

Kelompok Usia	2018	2019
(1)	(2)	(3)
7-12 Tahun	100,00	99,97
13-15 Tahun	90,94	91,65
16-18 Tahun	80,63	79,18

Catatan : Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, dan paket C)

Sumber: Susenas 2018-2019 (diolah)

3.4 Ketenagakerjaan

Berdasarkan proyeksi BPS atas dasar Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 291.667 jiwa. Dari jumlah tersebut, 221.685 jiwa merupakan penduduk berusia kerja. Dari penduduk berusia kerja, sebanyak 142.876 jiwa merupakan angkatan kerja dan sebanyak 78.809 jiwa merupakan bukan angkatan kerja. Dengan komposisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 64,45 persen. Artinya pada setiap 100 penduduk usia kerja terdapat 64 s.d 65 angkatan kerja. Angkatan kerja ini terdiri dari 134.616 jiwa

yang bekerja dan 8.260 jiwa yang menganggur. Dengan komposisi ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Palangka Raya sebesar 5,78 persen.

Tabel 3.6 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Palangka Raya Tahun 2018-2019

URAIAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	283.612	291.667
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	135.185	142.876
Jumlah Penduduk yang Bekerja (jiwa)	127.325	134.616
Jumlah Penduduk yang Menganggur (jiwa)	7860	8260
TPT/ Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,81	5,78
TPAK/ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,99	64,45

Sumber: Sakernas 2018-2019

Para pekerja akan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa pada suatu instansi/ perusahaan yang disebut upah/ gaji/ pendapatan bersih adalah. Besaran pendapatan erat kaitannya dengan pendidikan yang ditamatkan, pada umumnya pekerja dengan jenjang pendidikan tinggi pada lapangan pekerjaan yang sesuai akan memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi bila dibandingkan pendapatan pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Selain tingkat pendidikan, lapangan usaha dan status pekerjaan juga mempengaruhi tingkat pendapatan pekerja. Status pekerjaan terbagi menjadi dua yaitu pekerja formal (buruh/karyawan/pegawai) dan informal (berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, berusaha sendiri dibantu buruh tetap/dibayar, dan pekerja bebas disektor pertanian maupun nonpertanian).

Rata-rata upah/ gaji/ pendapatan bersih sebulan Penduduk Palangka Raya usia 15 Tahun ke atas pada tahun 2019 sebesar Rp 3.650.142. Bila dibandingkan menurut status pekerjaan, upah/gaji/pendapatan bersih pekerja formal lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja informal. Pada tahun 2019 rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih Pekerja formal sebesar Rp. 3.901.724, dan pekerja informal sebesar Rp. 2.945.298.

Tabel 3.7 Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Pekerja Informal menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Palangka Raya Tahun 2019 (Rupiah)


Ijazah/STTB	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Tidak Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	1 759 265	2 434 797
SD	2 231 400	2 295 492
SMP	2 442 464	3 479 439
SMA	3 784 185	2 794 401
SMK	3 033 823	3 895 831
Diploma I/II/III	3 903 320	3 282 393
Universitas	5 039 138	2 753 028
Rata-Rata	3 901 724	2 945 298
Rata-Rata palangka raya	3 650 142	

Sumber: Sakernas 2019 (diolah)

Pada tahun 2019 untuk pekerja formal menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula rata-rata upah/ gajinya. Hal ini terlihat pada rata-rata upah/ gaji tertinggi diperoleh pekerja dengan pendidikan tamatan universitas dan diploma I/II/III dengan nilai sebesar RP 5.039.138 dan Rp 3.903.320. Rata-rata upah/ gaji terendah diterima oleh pekerja yang tidak/ belum tamat SD yakni senilai Rp 1.759.265. Sedangkan pada pekerja informal tingginya pendapatan bersih selama sebulan tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan. Pekerja informal pendapatan bersih tertinggi lulusan SMK yaitu sebesar Rp. 3.282.393 dan terendah lulusan SD yaitu sebesar Rp. 2.295.492.

3.5 Perekonomian

Kota Palangka Raya merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi mulai dari perdagangan, pendidikan, perbankan, industri pengolahan, transportasi, pemerintahan dan banyak aktivitas bisnis lainnya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai lapangan usaha memiliki cabang yang tersebar di berbagai kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, berinduk atau memiliki kantor pusat di Palangka Raya. Hal ini membuat Palangka Raya memiliki ciri sebagai Ibu Kota provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sektor-sektor unggulan. Adapun lima sektor unggulan



pada tahun 2019 adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai kota pusat pemerintahan kategori ini memiliki *share* sebesar 21,51 persen, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,85 persen, Kategori Konstruksi dengan *share* sebesar 11,06 persen, Industri Pengolahan dengan *share* sebesar 9,96 persen, dan Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,42 persen.

Pada 17 kategori lapangan usaha, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2018 sebesar 29,93 persen. Pada tahun 2019 persentase tenaga yang diserap menurun menjadi 24,43 persen, tetapi masih lebih tinggi daripada kategori lain. Kategori terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja pada tahun 2017 dan 2018 masih sama, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, masing-masing 14,30 persen dan 18,07 persen. Kategori terbesar ketiga dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2018 adalah Industri Pengolahan (8,85 persen), sedangkan kategori terbesar ketiga dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2019 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,54 persen). Perkembangan lapangan usaha/kategori yang banyak menyerap tenaga kerja menyebabkan arus migrasi masuk ke Kota Palangka Raya, yang secara tidak langsung memengaruhi kategori-kategori lain untuk ikut berkembang. Kehadiran migran di Kota Palangka Raya ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi di Kota Palangka Raya, memengaruhi Kategori Akomodasi, Hotel dan Restoran; dan Jasa Keuangan, dan Jasa Perusahaan.

3.6 Pengeluaran Rumah Tangga

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Palangka Raya dari tahun ke tahun dilihat dari sisi pengeluaran akan lebih teridentifikasi dari persentase penduduk menurut golongan pengeluarannya. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita kurang dari Rp 750.000,- mengalami tren penurunan pada kurun waktu 2017 s.d 2019. Pada tahun 2017, persentase penduduk pada golongan ini mencapai 27,19 persen. Pada tahun 2018 turun menjadi 23,38 persen dan pada tahun 2019 hanya 17,71 persen.

Tabel 3.8 Persentase Penduduk Palangka Raya menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2017-2019

Golongan Pengeluaran perkapita Sebulan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
< 300 000	0,77	0,64	0,00
300 000 - 499 999	5,05	4,74	2,10
500 000 - 749 999	21,37	18,00	15,61
750 000 - 999 999	13,32	8,88	12,72
1000 000 - 1 499 999	20,78	20,79	18,42
1 500 000+	38,70	46,96	51,16
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017-2019 (diolah)

Selama kurun waktu 2017-2019 terjadi peningkatan persentase penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita sebulan lebih dari Rp 1.500.000. Pada tahun 2017 golongan ini mencapai 38,70 persen. Kemudian menjadi 46,96 persen pada tahun 2018 dan mencapai 51,16 persen pada tahun 2019. Dengan semakin mengecilnya persentase penduduk pada golongan pengeluaran perkapita yang rendah dan semakin meningkatnya persentase penduduk pada golongan pengeluaran perkapita yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rata-rata penduduk Palangka Raya semakin meningkat pada kurun waktu 2017-2019.

BAB

04

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Palangka Raya Tahun 2019

80,77



Perkembangan IPM Kota Palangka Raya

IPM Tahun 2019 tumbuh

0,54%



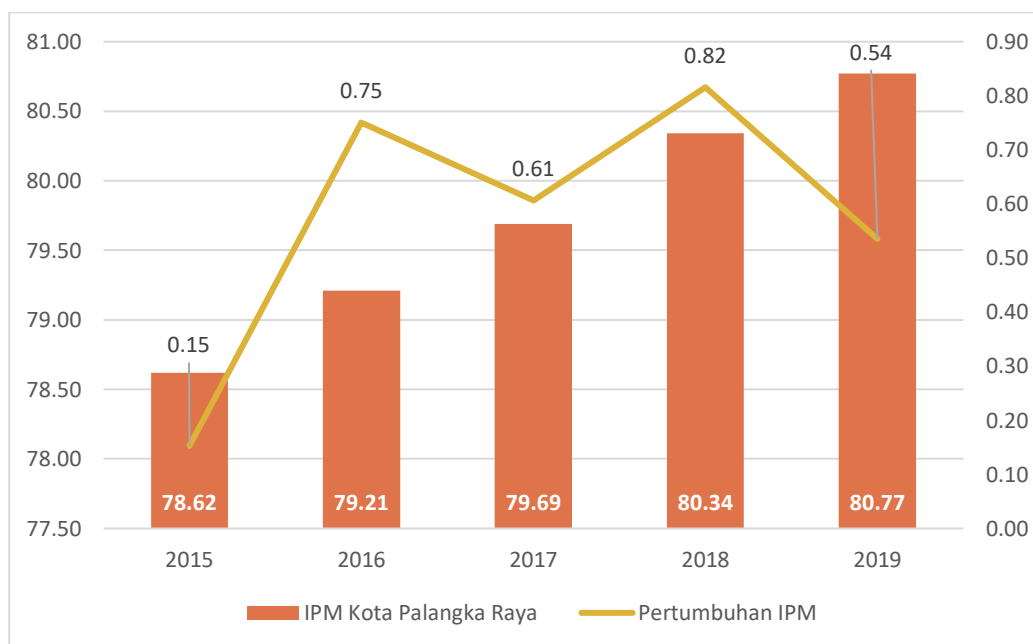
BAB IV

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Status pembangunan manusia Kota Palangka Raya, secara umum dapat digambarkan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palangka Raya. Untuk melihat bagaimana status pembangunan manusia, diperlukan adanya keterbandingan pencapaian antar waktu dan antar daerah, khususnya dalam satu provinsi yang sama. Perbandingan antar waktu akan menunjukkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah, sedangkan perbandingan antar daerah dapat keunggulan suatu daerah terhadap daerah lain. Sekaligus sebagai pendorong bagi daerah yang masih tertinggal.

Gambar 4.1 IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019



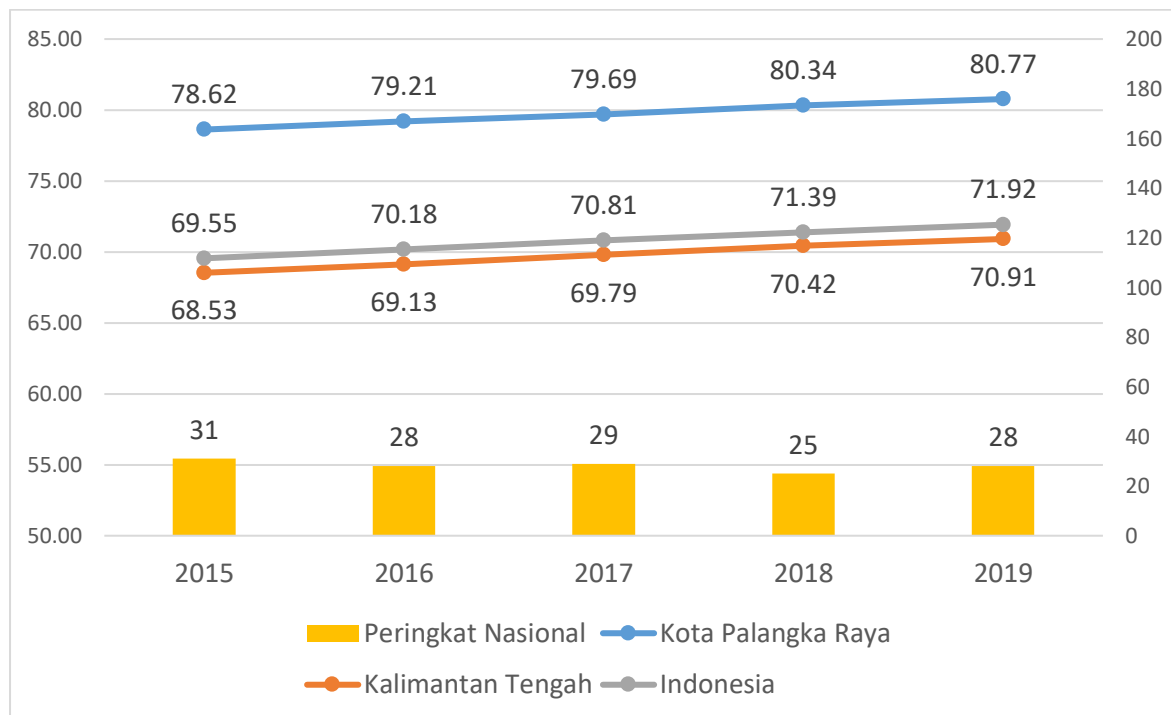
Sumber : BPS

Pada periode 2015 s.d 2017 nilai IPM Palangka Raya berada pada rentang 70-79. Rentang ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Palangka Raya pada periode tersebut masuk dalam kategori “tinggi”. Bahkan, pada tahun 2018 dan 2019 nilai IPM mencapai 80,34 dan 80,77 yang artinya Palangka Raya masuk kategori “sangat tinggi”. Peningkatan IPM setiap tahunnya mengindikasikan semakin baiknya

kualitas hidup masyarakat Palangka Raya yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup dalam dimensi kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak.

Nilai IPM Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 80,77 lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPM sebesar 70,91 dan IPM Indonesia sebesar 71,92. Kondisi ini juga terjadi pada periode 2015 s.d 2019. Pada level nasional, pada tahun 2015 peringkat IPM Palangka Raya berada pada urutan ke-31. Setelah itu peringkat Palangka Raya berfluktuasi. Pada tahun 2016 berada peringkat 28, tahun 2017 pada peringkat 29, tahun 2018 pada urutan ke-25, dan pada tahun 2019 kembali ke peringkat 28. Hal ini menunjukkan bahwa Palangka Raya dan kabupaten/ kota lain di Indonesia saling berlomba dalam membangun kualitas kehidupan masyarakatnya. Perubahan peringkat ini sejalan dengan pertumbuhan IPM Palangka Raya sebagaimana pada Gambar 4.2 yang juga berfluktuasi.

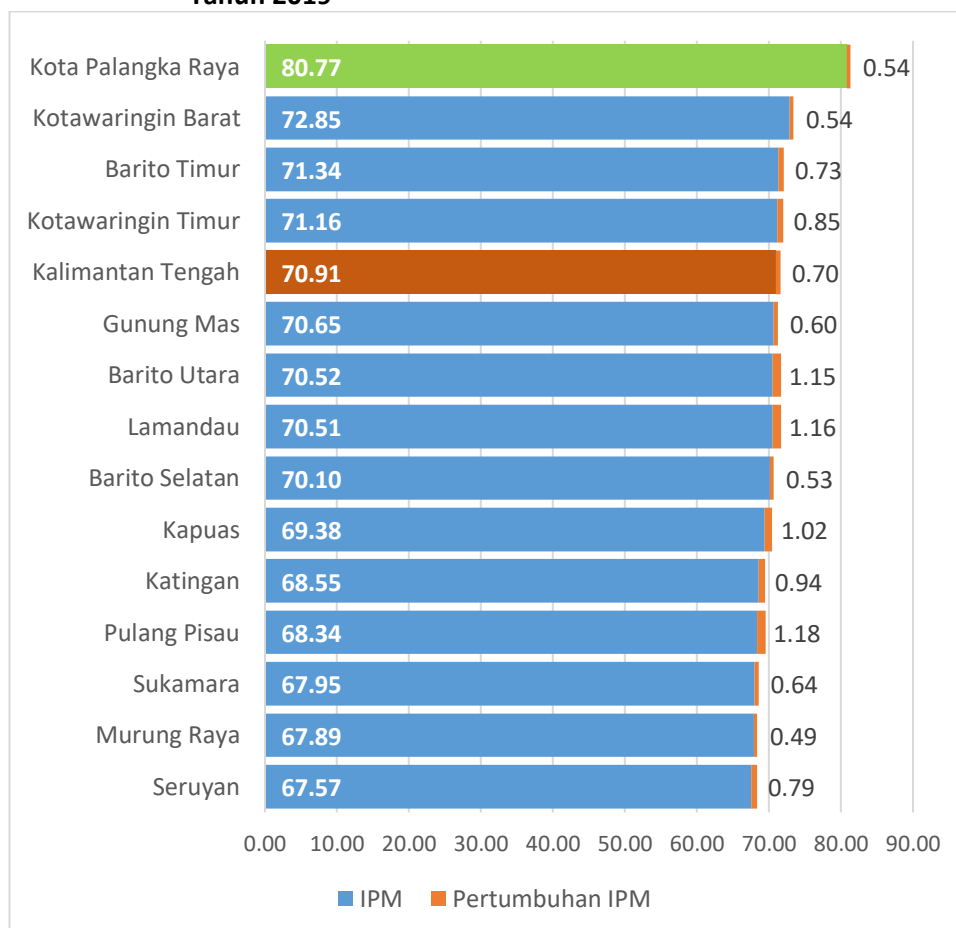
Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia, Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber : BPS

Pada level Kalimantan Tengah, peringkat IPM Palangka Raya selalu berada pada peringkat pertama. Pada tahun 2018 dan 2019 Palangka Raya mencapai kategori **sangat tinggi** dengan nilai 80,34 dan 80,77. Hal ini terutama dikarenakan Palangka Raya merupakan ibukota provinsi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup lengkap. Kabupaten dengan IPM terbaik selanjutnya adalah Kotawaringin Barat dengan nilai 72,85 dan Barito Timur dengan nilai 71,34. Adapun kabupaten dengan IPM terendah adalah Seruyan dengan nilai 67,57 dan Murung Raya dengan nilai 67,89. Hal ini menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia yang cukup tinggi antara Palangka Raya dengan kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Jarak nilai IPM antara Palangka Raya dengan Kotawaringin Barat mencapai 7,92 poin, sedangkan jarak nilai IPM antara Palangka Raya dengan Seruyan mencapai 13,20 poin.

Gambar 4.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2019



Sumber : BPS

Kabupaten lain telah melakukan pembangunan manusia, bahkan beberapa kabupaten pertumbuhan IPM-nya lebih tinggi dari Palangka Raya. Akan tetapi, jarak nilai IPM dengan Palangka Raya juga masih tinggi. Pada dimensi kesehatan diakibatkan karena fasilitas dan tenaga kesehatan di Palangka Raya adalah yang paling lengkap dari kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Pada dimensi pengetahuan, fasilitas pendidikan di Palangka Raya juga merupakan yang paling lengkap, bahkan hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal ini kemungkinan juga dilatarbelakangi oleh perekonomian utama di masing-masing daerah. Lapangan usaha terbesar di Palangka Raya adalah Jasa Pemerintahan yang lebih banyak membutuhkan pekerja dengan pendidikan tinggi. Adapun di kabupaten lain pekerja yang dibutuhkan di sektor perkebunan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.

4.2 Perkembangan Komponen IPM dan Penghitungan IPM

IPM adalah indikator komposit yang memadukan dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang dipresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Upaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan seiring dengan peningkatan indikator-indikator sosial yang berkaitan dengan pembangunan. Tabel 3.1 menggambarkan perkembangan indikator IPM di Kota Palangka Raya selama periode lima tahun terakhir.

Ilustrasi penghitungan angka IPM Palangka Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Kesehatan $= \frac{(73,19-20)}{(85-20)} = 0,8183$
- b. Indeks Harapan Lama Sekolah $= \frac{(14,94-0)}{(18-0)} = 0,83$
- c. Indeks Rata-rata Lama Sekolah $= \frac{(11,51-0)}{(15-0)} = 0,7673$
- d. Indeks Pendidikan $= \frac{(0,83+0,7673)}{2} = 0,79865$
- e. Indeks Pengeluaran $= \frac{\ln(14.091.000) - \ln(1.007.436)}{\ln(26.572.352) - \ln(1.007.436)} = 0,80616$

$$\begin{aligned}
 \text{f. IPM} &= \sqrt[3]{0,8183 \times 0,79865 \times 0,80616} \times 100 \\
 &= 80,77
 \end{aligned}$$

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Angka Harapan Hidup AHH (Tahun)	Harapan Lama Sekolah HLS (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah RLS (Tahun)	Pengeluaran riil per kapita disesuaikan PPd (ribu Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	72,97	14,90	10,74	12 628,65
2016	73,05	14,91	11,02	12 899,00
2017	73,13	14,92	11,03	13 435,00
2018	73,16	14,93	11,42	13 677,00
2019	73,19	14,94	11,51	14 091,00

Sumber : BPS

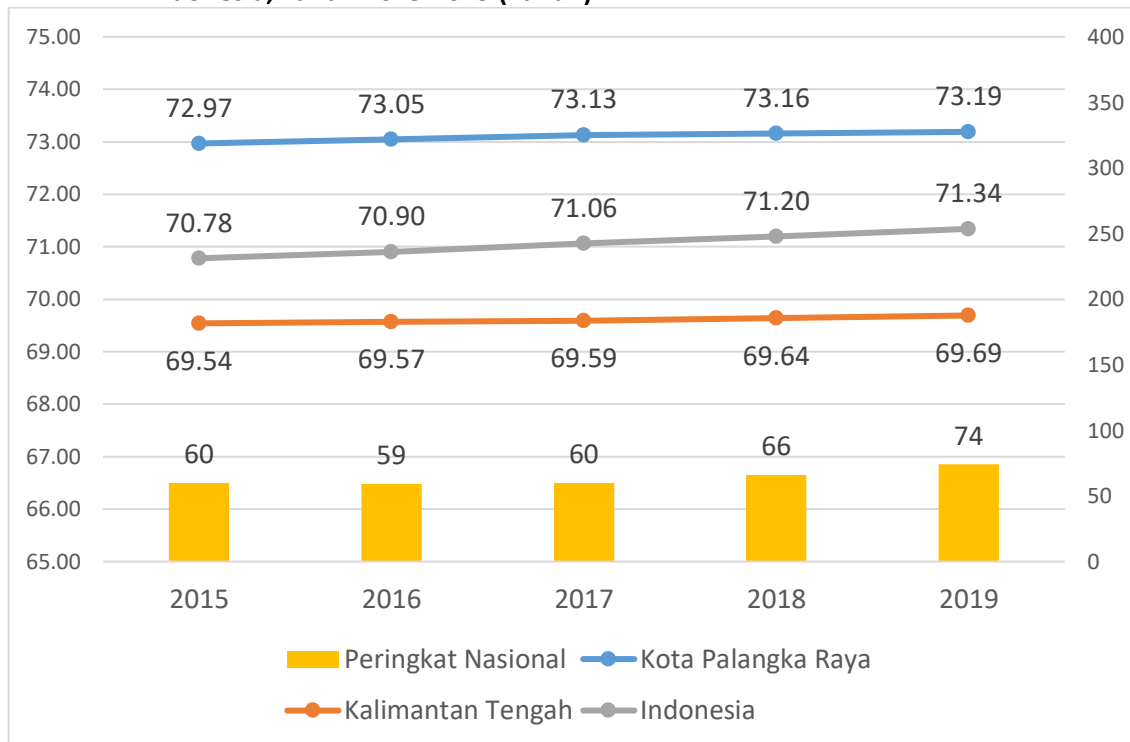
4.3 Perkembangan Dimensi Umur Panjang dan Sehat

Di dalam IPM, dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan dalam indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH menggambarkan perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok manusia tertentu. Semakin tinggi AHH mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Indikator panjang umur dari seseorang di suatu wilayah atau negara bukan hanya upaya individu, tetapi merupakan upaya masyarakat secara keseluruhan (di tingkat kabupaten/kota) untuk menggunakan sumber daya yang ada sehingga dapat memperpanjang hidupnya. Dapat dikatakan seseorang akan bertahan hidup lebih panjang apabila memiliki harapan hidup yang tinggi saat lahir (status gizi dan kesehatan *prenatal* dan *postnatal*), selalu sehat, atau jika sakit dapat segera berobat untuk mempercepat kesembuhannya.

Perkembangan AHH Kota Palangka Raya dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang lambat tetapi pasti. Dari AHH sebesar 72,97 tahun pada tahun 2015, kini telah mencapai 73,19 tahun pada tahun 2019, yang berarti telah mencapai angka 73 tahun. Lambatnya kenaikan AHH ini menggambarkan bahwa memang tidak mudah

untuk menaikkan satu tahun dari indikator ini. Perlu upaya yang keras di bidang kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkannya, apalagi jika angka yang dicapainya sudah tinggi.

Gambar 4.4 Angka Harapan Hidup Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia, Tahun 2015-2019 (Tahun)

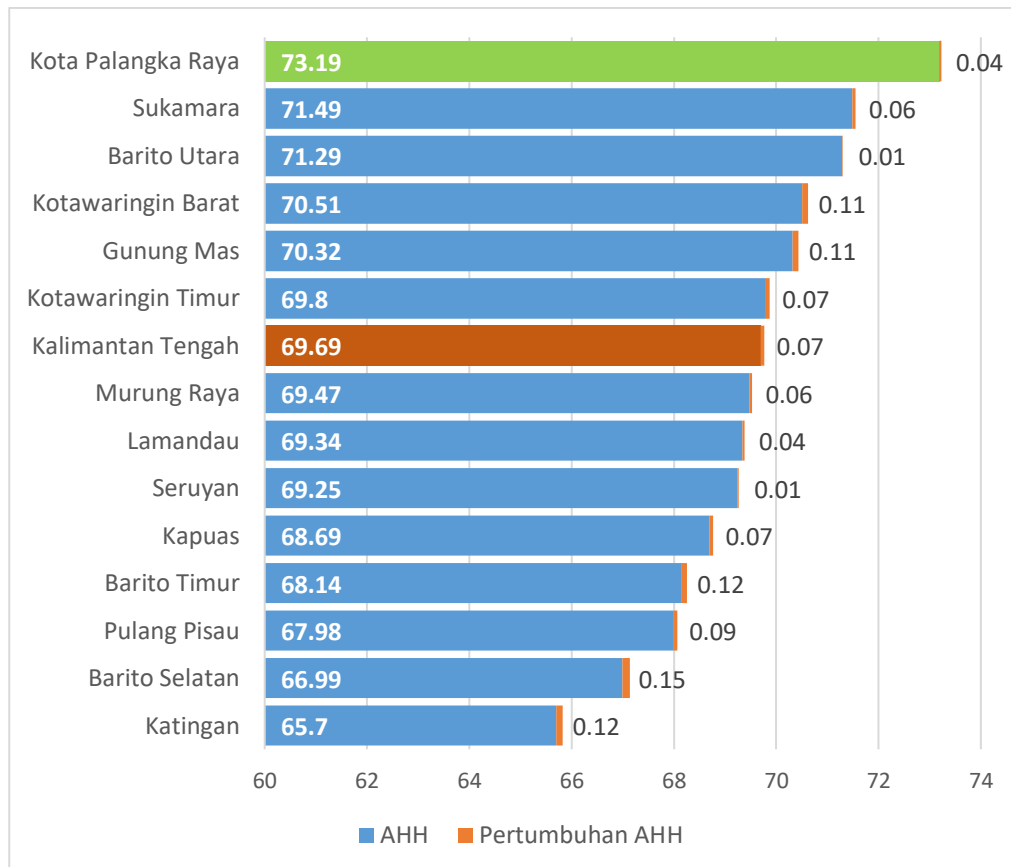


Sumber : BPS

Pada periode 2015 s.d 2019 AHH Kota Palangka Raya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan AHH Palangka Raya dengan Provinsi Kalimantan Tengah. AHH Palangka Raya selalu di atas Kalimantan tengah dengan perbedaan 3,43 tahun pada tahun 2015 dan menjadi 3,50 pada tahun 2019. AHH Palangka Raya pada periode tersebut juga selalu lebih tinggi daripada AHH Indonesia pada periode yang sama. Jadi, secara umum kondisi dimensi kesehatan Palangka Raya lebih baik daripada rata-rata kabupaten/ kota lain di Indonesia. Meskipun demikian, jika dilihat peringkat AHH secara nasional, AHH Palangka Raya mengalami penurunan peringkat. Pada tahun 2015 AHH Palangka Raya berada pada peringkat 60 secara nasional, tetapi pada tahun 2019 berada pada peringkat 74. Jadi, terdapat kabupaten/ kota lain di Indonesia yang perkembangan dimensi kesehatannya lebih tinggi daripada Palangka Raya pada periode 2015 s.d 2019.

Gambar 4.5. menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Palangka Raya adalah kota yang memiliki AHH tertinggi di Kalimantan Tengah dengan AHH 73,19 tahun. Kemudian disusul oleh Sukamara dengan AHH sebesar 71,49 tahun dan Barito Utara dengan AHH sebesar 71,29 tahun. Adapun AHH terendah adalah Kabupaten Katingan dengan 65,70 tahun dan Barito Selatan dengan 66,99 tahun.

Gambar 4.5. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Tahun)



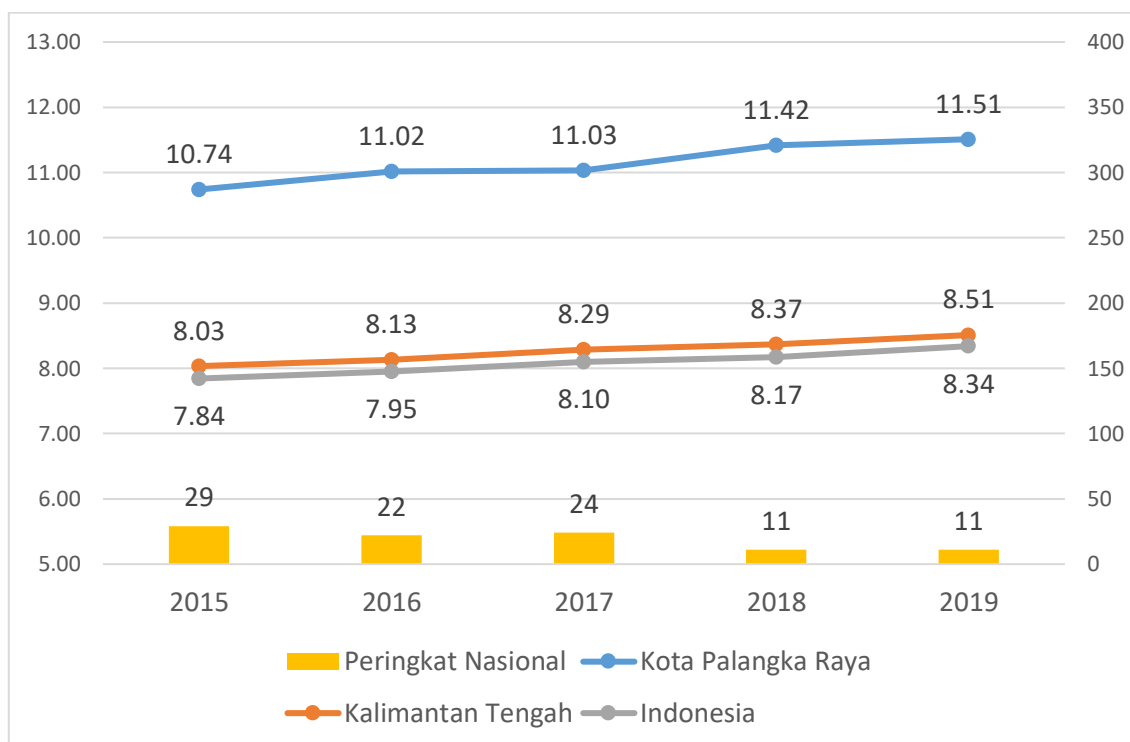
Sumber : BPS

4.4 Perkembangan Dimensi Pengetahuan

Manusia merupakan salah satu sumber daya dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya diwujudkan melalui sarana pendidikan. Simanjuntak (2000:69) menuturkan, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi yang

imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian. Di dalam IPM, dimensi pengetahuan dapat direpresentasikan dengan indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS menunjukkan berapa tahun penduduk usia 7 tahun ke atas yang ingin menempuh pendidikan formal, sedangkan RLS menunjukkan berapa tahun penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikannya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir atau seseorang sudah tidak menduduki bangku sekolah.

Gambar 4.6 Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional, Tahun 2015-2019 (Tahun)

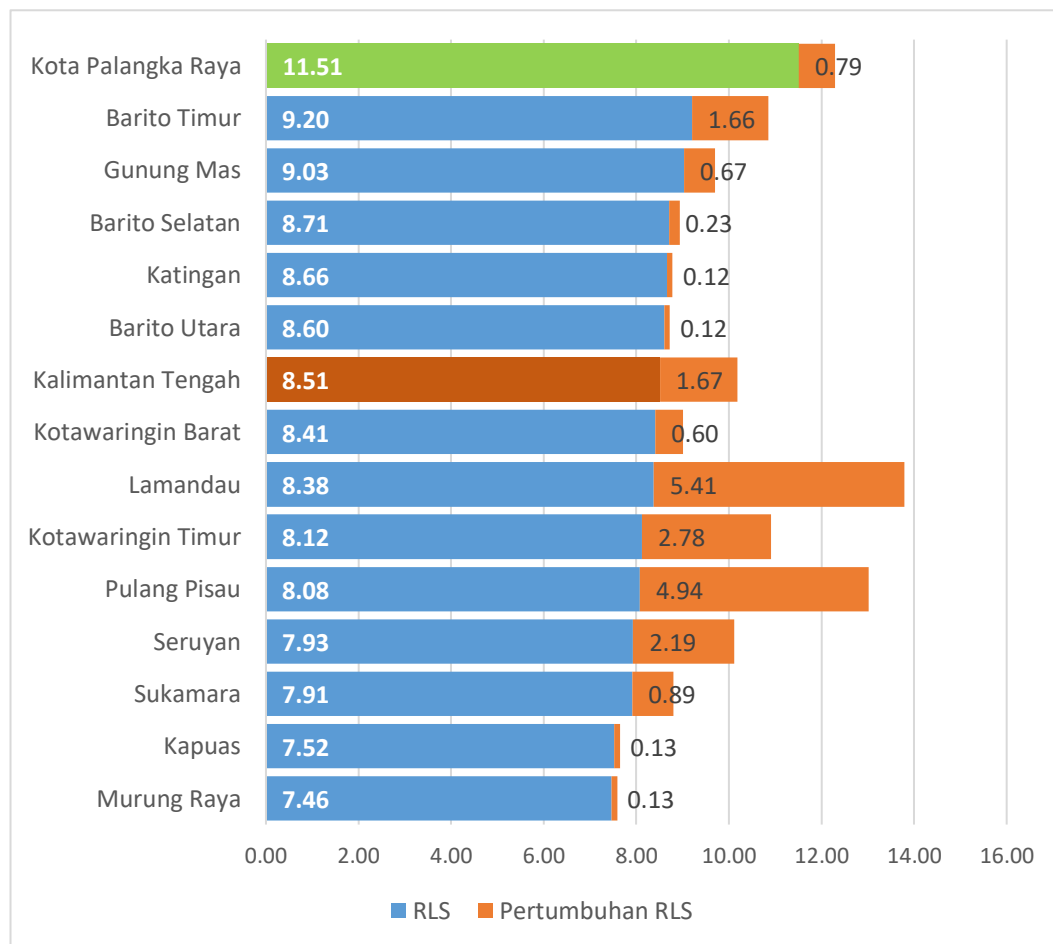


Sumber : BPS

RLS mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai RLS sebesar 10,74 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 11,51 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa RLS penduduk Palangka Raya selama kurun waktu 2015 s.d 2019 telah bertambah dari rata-rata kelas 1 SMA menjadi kelas 2 SMA. Pergeseran angka RLS relatif cukup kecil dari tahun ke tahun karena penduduk usia 25 tahun ke atas cenderung lebih banyak yang tidak bersekolah lagi. Dengan demikian, perbaikan angka RLS lebih banyak dipengaruhi oleh generasi-generasi baru yang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua.


Bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Indonesia, RLS penduduk Palangka Raya lebih tinggi daripada RLS sebagian kabupaten/ kota lain di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai RLS yang selalu lebih tinggi dari RLS Indonesia pada periode 2015 s.d 2019. Pada tahun 2015 RLS penduduk Indonesia setara kelas 1 SMP, sedangkan RLS Palangka Raya telah setara kelas 1 SMA. Pada tahun 2019 RLS penduduk Indonesia menjadi kelas 2 SMP, masih di bawah RLS Palangka Raya yang telah setara kelas 2 SMA. Pada tahun 2015, peringkat RLS Palangka Raya berada pada urutan 29 dan pada tahun 2019 semakin baik hingga berada pada urutan 11 secara nasional.

Gambar 4.7 RLS Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah,Tahun 2019 (Tahun)



Sumber : BPS

Pada level provinsi, Palangka Raya menduduki peringkat teratas RLS pada tahun 2019. Adapun peringkat selanjutnya berturut-turut Barito Timur dengan RLS sebesar 9,20 tahun dan Gunung Mas dengan RLS sebesar 9,03 tahun. Adapun kabupaten



dengan RLS terendah adalah Murung Raya dengan RLS sebesar 7,46 tahun dan Kapuas dengan RLS sebesar 7,52 tahun. Dengan demikian, RLS di kedua kabupaten tersebut hanya sampai kelas 1 SMP. Jenjang pendidikan tersebut cukup jauh bila dibandingkan dengan Palangka Raya yang telah mencapai RLS hingga kelas 2 SMA. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendidikan yang cukup tinggi.

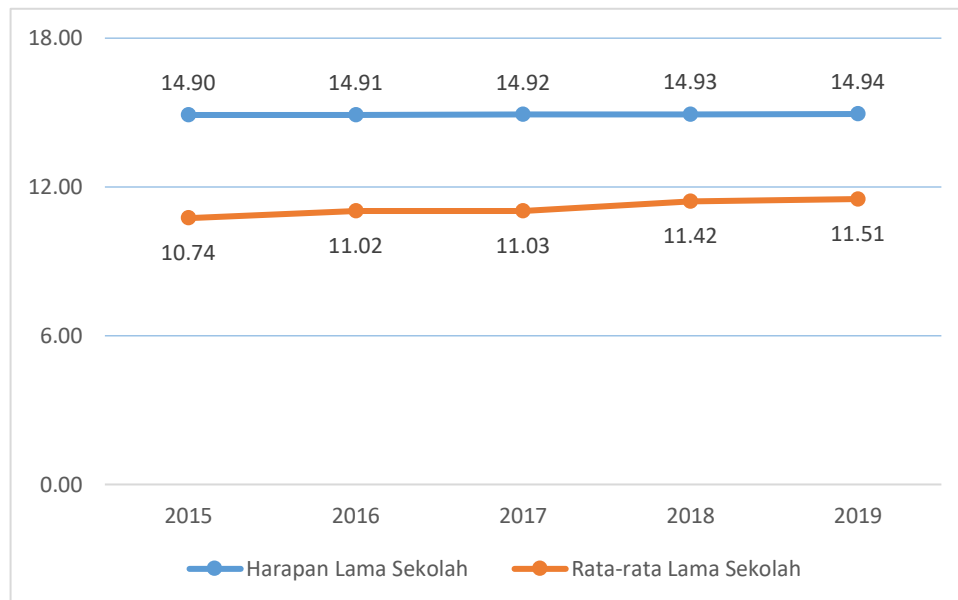
Beberapa hal yang dapat menjadi pemicu kesenjangan RLS Palangka Raya dengan kabupaten lain di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan masyarakat Palangka Raya cukup baik sehingga relatif mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi.
- b. Fasilitas pendidikan di Palangka Raya cukup lengkap hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, masyarakat menengah yang ingin melanjutkan perguruan tinggi dapat tetap tinggal di rumah orang tua sehingga mengurangi biaya kos.
- c. Dari sisi ekonomi, sektor ekonomi utama di Palangka Raya adalah Jasa Pemerintahan yang lebih membutuhkan pekerja dengan pendidikan tinggi, minimal SMA. Adapun di kabupaten lain, sektor ekonomi yang cukup besar biasanya tidak terlalu banyak membutuhkan pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Sebagai contoh pekerja pada sektor perkebunan. Dengan demikian, para pekerja yang masuk ke Palangka Raya relatif akan meningkatkan angka RLS, sedangkan para pekerja yang masuk ke kabupaten lain kurang signifikan dalam meningkatkan angka RLS.

RLS merupakan ukuran dari lamanya sekolah penduduk yang telah ditempuh oleh penduduk di suatu wilayah, khususnya pada penduduk berumur 25 tahun ke atas. Adapun HLS merupakan ukuran lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di suatu wilayah. HLS berasal dari proporsi penduduk umur 7 tahun ke atas yang masih sekolah dengan jumlah penduduk pada setiap umur. Dengan demikian, bila indikator partisipasi sekolah pada usia sekolah beberapa tahun terakhir cukup tinggi, maka nilai yang akan terpengaruh dalam jangka pendek adalah HLS, sedangkan RLS akan terpengaruh dalam jangka panjang. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa pada periode 2015 s.d 2019 nilai HLS selalu lebih tinggi daripada RLS. Hal ini menunjukkan keberhasilan

program wajib belajar 9 tahun, terutama pada anak-anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dimensi pendidikan generasi muda relatif lebih baik daripada generasi sebelumnya.

Gambar 4.8 Perkembangan RLS dan HLS Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019



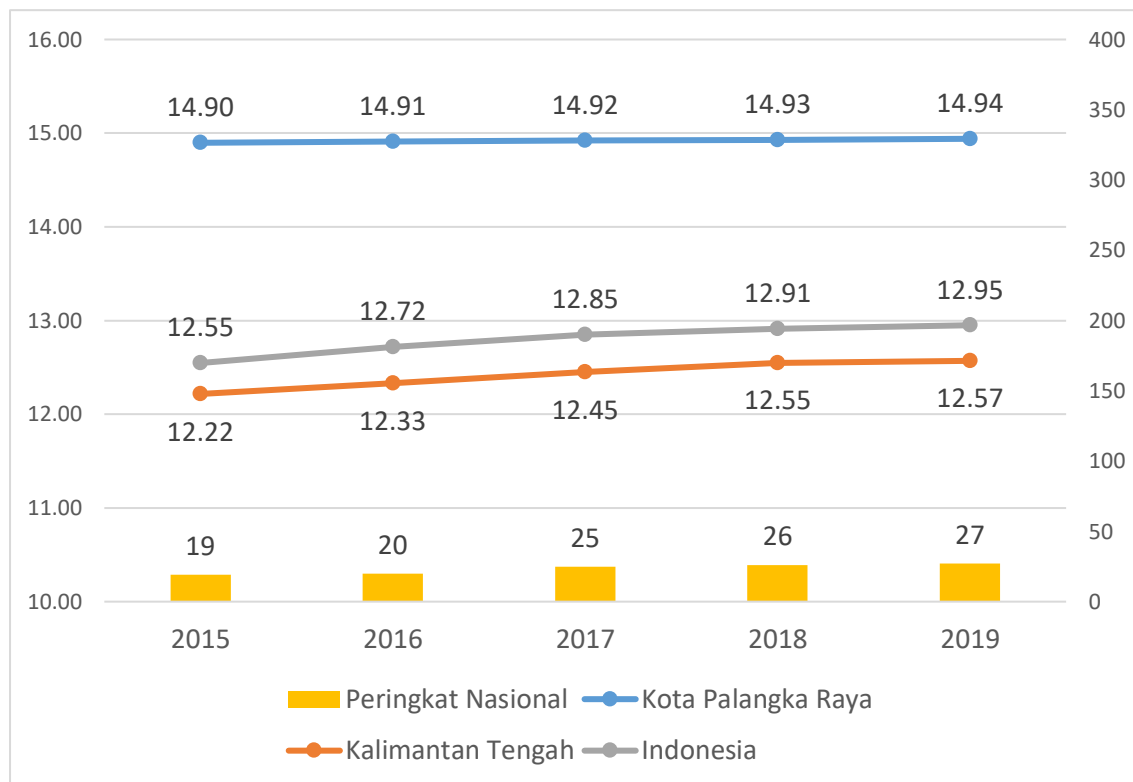
Sumber : BPS

Pada tahun 2019, angka HLS sebesar 14,94 tahun yang artinya, penduduk di Kota Palangka Raya berharap supaya dapat menempuh pendidikan formal setidaknya selama 14,94 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menempuh pendidikan setidaknya sampai jenjang universitas atau setidaknya program Diploma 3.

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa perkembangan HLS Palangka Raya dari tahun 2015 ke tahun 2019 tergolong cukup lambat karena hanya bertambah 0,04 tahun, yaitu dari 14,90 tahun menjadi 14,94 tahun. Pada periode yang sama, HLS Kalimantan Tengah bertambah 0,35 tahun, yaitu dari 12,22 tahun menjadi 12,57 tahun. Pada level nasional, HLS Indonesia pada periode yang sama berkembang dari 12,55 tahun menjadi 12,95 tahun atau bertambah 0,40 tahun. Peringkat HLS Palangka Raya pun mengalami penurunan, dari peringkat 19 pada tahun 2015 menjadi peringkat 27 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun HLS Palangka Raya bertambah tetapi beberapa

kabupaten/ kota lain di Indonesia memiliki perkembangan yang lebih baik. Salah satu faktor penghambat perkembangan angka HLS adalah faktor biaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar pula biaya yang diperlukan.

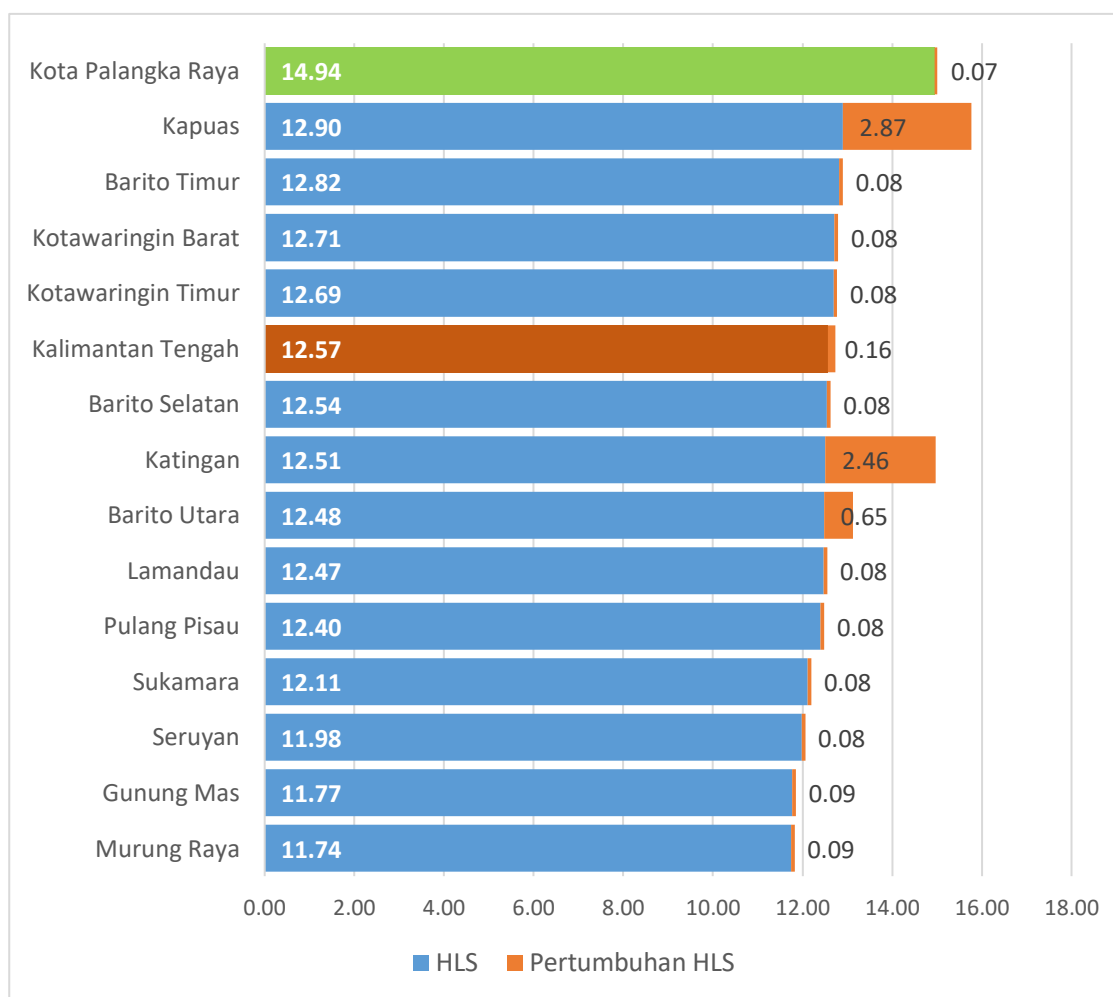
Gambar 4.9 Angka HLS Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional, Tahun 2015-2019 (Tahun)



Sumber : BPS

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Kota Palangka Raya (14,94 tahun) memiliki angka HLS tertinggi disusul Kabupaten Kapuas (12,90 tahun) dan Kabupaten Barito Timur (12,82 tahun) pada posisi ke tiga teratas. Adapun kabupaten dengan HLS terendah adalah Murung Raya dengan nilai sebesar 11,74 tahun dan Gunung Mas dengan HLS sebesar 11,77 tahun. Salah satu faktor yang turut berpengaruh pada HLS Palangka Raya lebih tinggi dari kabupaten lain di Kalimantan Tengah adalah banyaknya sekolah ataupun universitas di Palangka Raya. Mahasiswa ataupun anak sekolah dari kabupaten lain yang sedang menempuh pendidikan di Palangka Raya akan tercatat sebagai penduduk.


Gambar 4.10 HLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2019 (Tahun)



Sumber : BPS

4.5 Perkembangan Dimensi Hidup Layak

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang setiap tahun dilaksanakan BPS dan dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Selain itu, rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/ riil dengan tahun dasar 2012=100. Kemudian dilakukan perhitungan paritas daya beli dengan menggunakan 96 komoditas, terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.



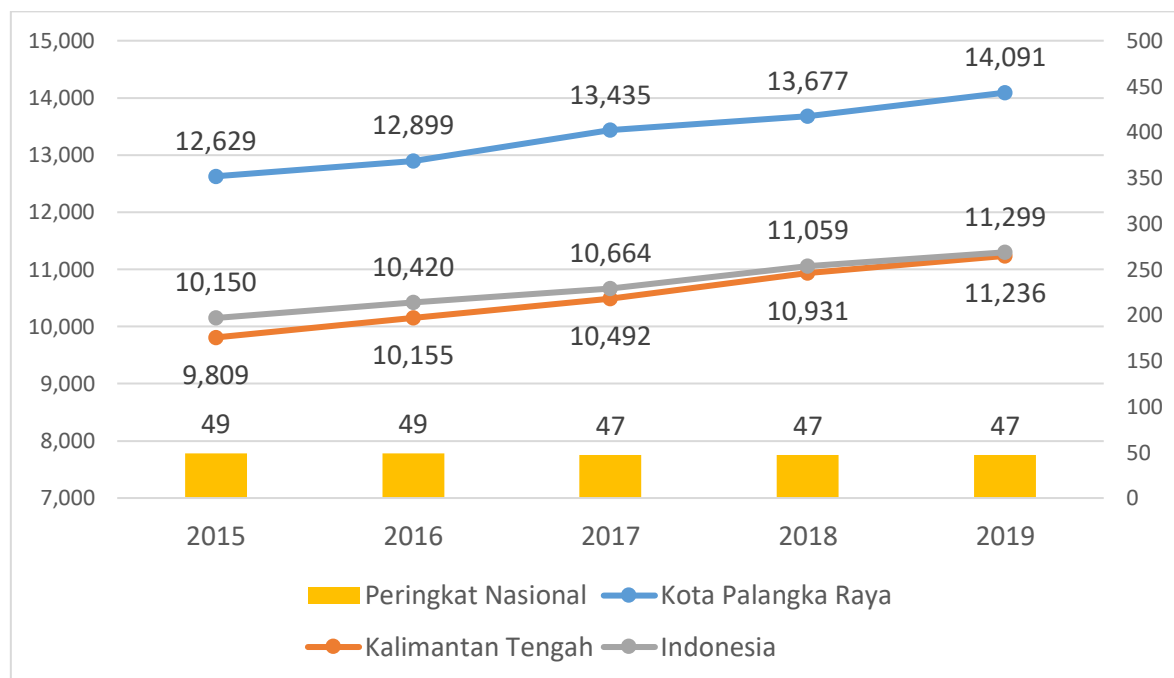
Dari penjelasan di atas, beberapa hal yang perlu menjadi catatan sebelum menganalisis pengeluaran perkapita disesuaikan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Dari sisi besaran rupiah, nilai pengeluaran perkapita disesuaikan ini telah disesuaikan dengan tahun dasar 2012. Jadi, kurang tepat bila dibandingkan dengan nilai rupiah saat ini.
- b. Meskipun sumber data penghitungan pengeluaran perkapita disesuaikan dan garis kemiskinan sama, yaitu data pengeluaran rumah tangga dari Susenas, tetapi keduanya merupakan ukuran yang berbeda. Metode penghitungan dan basket komoditas yang digunakan berbeda di antara keduanya. Dengan demikian, kita tidak dapat membandingkan secara langsung antara pengeluaran perkapita disesuaikan dan garis kemiskinan.
- c. Istilah paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*) **tidak** dimaksudkan bahwa pengeluaran perkapita disesuaikan ini suatu standar biaya hidup suatu wilayah tertentu. Proses penghitungan paritas daya beli ini dimaksudkan agar daya beli suatu kabupaten/ provinsi dapat dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pengeluaran perkapita yang dibagi dengan paritas daya beli akan menghasilkan pengeluaran di semua wilayah didekati dengan biaya di Jakarta Selatan. Dengan demikian, satu rupiah di Palangka Raya atau kabupaten/ kota lain di Indonesia akan memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan.

Daya beli adalah kemampuan individu untuk membeli suatu barang dan jasa. Pengeluaran/ konsumsi riil per kapita disesuaikan diharapkan dapat mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya ekonomi, baik barang maupun jasa. Indikator komponen IPM yang digunakan untuk melihat dimensi hidup layak adalah pengeluaran/ konsumsi riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian penduduk. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ini dimaksudkan agar dapat melihat perkembangan peningkatan ataupun penurunan kuantitas ataupun kualitas konsumsi/ pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Dengan demikian dapat dilihat perkembangan hasil pembangunan manusia.

Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita setahun Kota Palangka Raya mencapai 14.091 ribu rupiah atau 14,1 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 414 ribu rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi empat tahun yang lalu (2015), peningkatannya sebesar 1.462 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian penduduk semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya daya beli.

Gambar 4.11 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia, Tahun 2015-2019 (Persen)



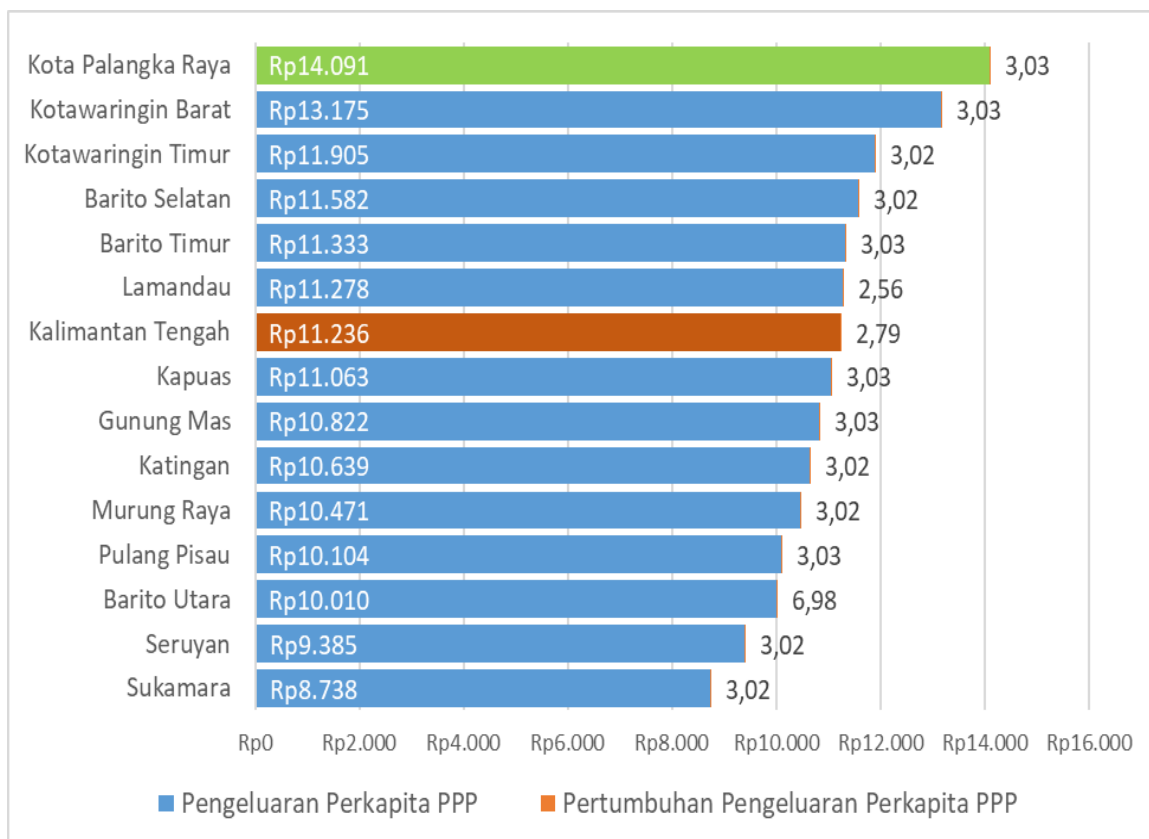
Sumber : BPS

Pengeluaran perkapita disesuaikan Palangka Raya yang sebesar Rp 14.091 ribu per tahun lebih tinggi daripada Indonesia yang hanya Rp 11.299 ribu per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa daya beli penduduk Palangka Raya lebih tinggi daripada rata-rata daya beli penduduk kabupaten/ kota lain di Indonesia. Pada tahun 2019, dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia pengeluaran perkapita disesuaikan Palangka Raya berada pada peringkat 47.

Pada lingkup Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya menduduki peringkat pertama disusul Kabupaten Kotawaringi Barat (Rp 13.175 ribu) dan Kotawaringin Timur (Rp 11.905 ribu). Adapun tiga Kabupaten dengan nilai terendah berturut-turut adalah

Kabupaten Sukamara (Rp 8.738 ribu), Seruyan (Rp 9.385 ribu), dan Barito Utara (Rp 10.010 ribu). Jarak antara pengeluaran perkapita disesuaikan Palangka Raya dengan kabupaten terendah adalah sebesar Rp 5.353 ribu. Namun, kita belum dapat menyimpulkan bahwa terjadi kesenjangan pengeluaran perkapita antar kabupaten/ kota di Kalimantan Tengah itu tinggi.

Gambar 4.12 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2018 (Ribu Rp)



Sumber : BPS

4.6 Disparitas Pengeluaran Perkapita

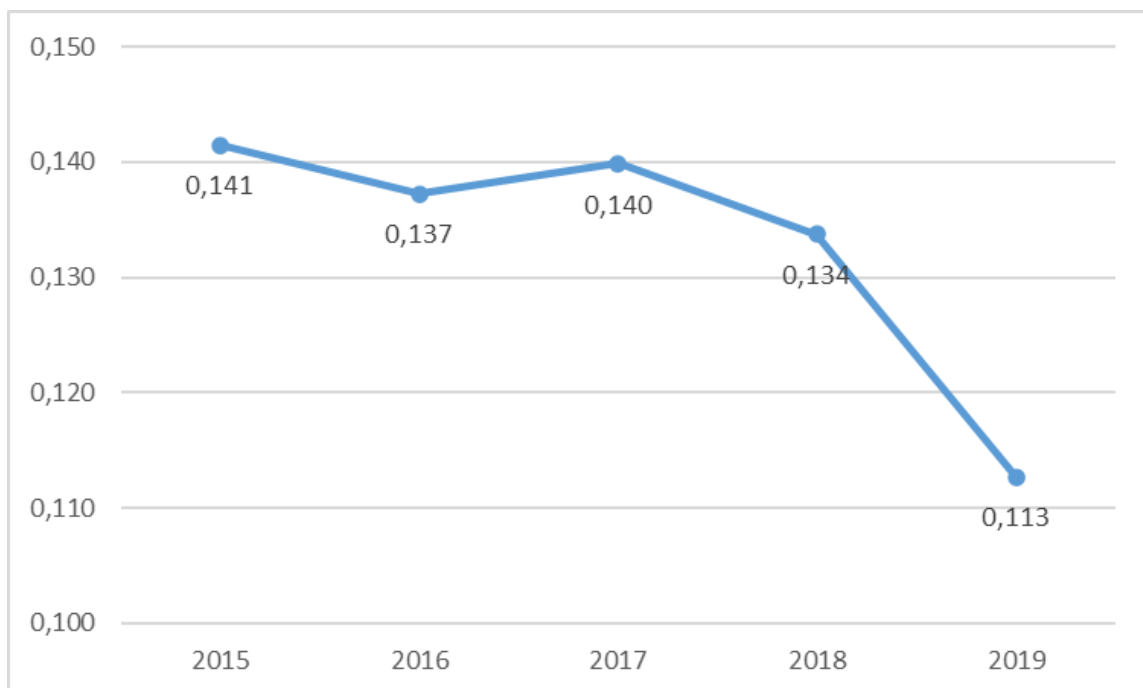
Salah satu ukuran melihat kesenjangan pendapatan antar daerah di suatu wilayah adalah Indeks Williamson. Matolla dalam Puspandika (2007) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah kriterianya:

- Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$

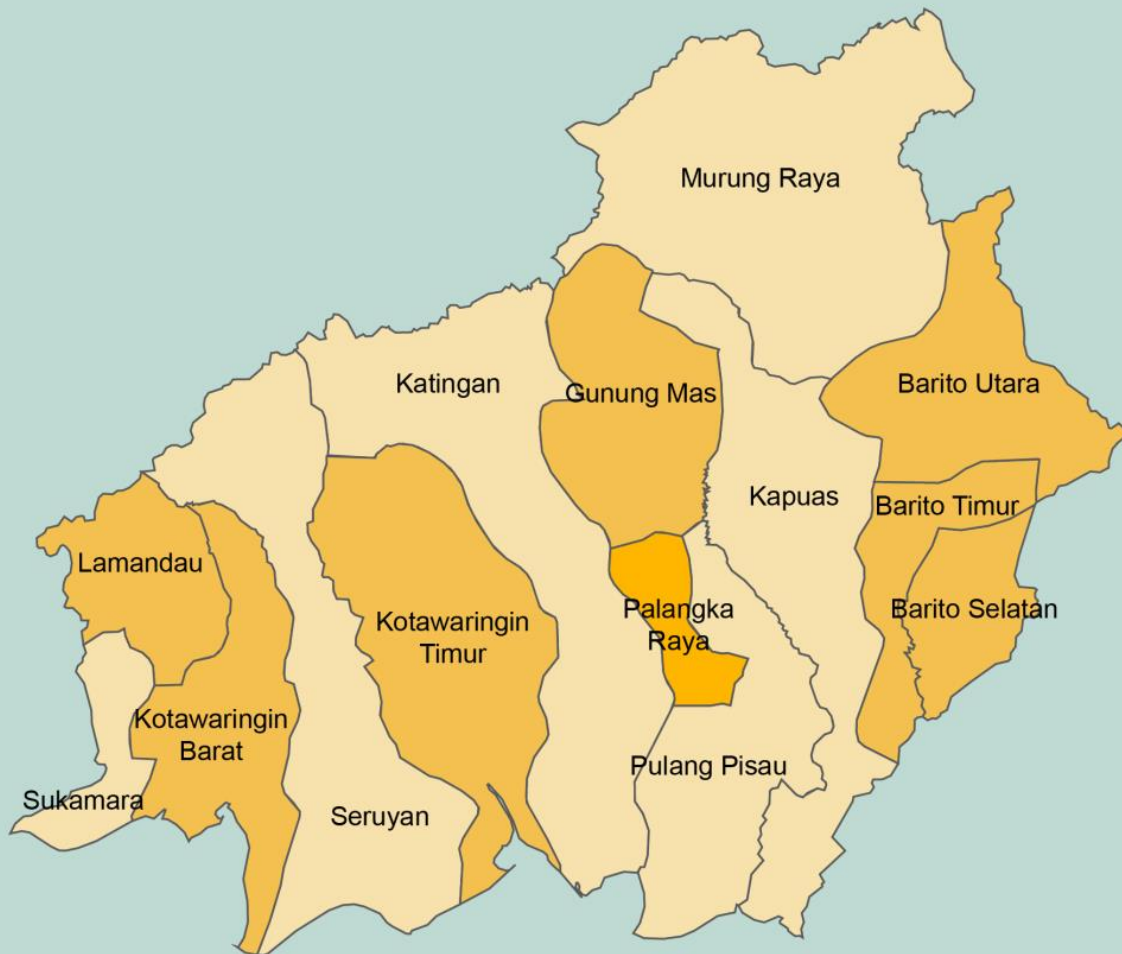
c. Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$

Hasil penghitungan Indeks Williamson periode 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.13. Perkembangan Indeks Williamson menunjukkan bahwa kesenjangan antar daerah di Kalimantan Tengah tergolong pada level rendah karena dari tahun 2015 s.d 2019 indeks selalu berada di bawah 0,35. Selain itu, dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang semakin kecil meskipun sedikit terjadi peningkatan pada tahun 2017.

Gambar 4.13 Perkembangan Indeks Williamson di Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Palangka Raya, hasil olah Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota 2019**Sangat Tinggi**
(IPM ≥ 80)

Palangka Raya

1 kota**Tinggi**
($70 \leq \text{IPM} < 80$)Kobar, Kotim,
Barsel, Barut,
Lamndau, Gumas,
Bartim**7 kabupaten****Sedang**
($60 \leq \text{IPM} < 70$)Kapuas, Sukamara,
Seruyan, Katingan,
Pulpis, Mura**6 kabupaten**


V. PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian yang telah disampaikan pada bagaian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia di Kota Palangka Raya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan juga terjadi di tahun 2019 dengan capaian IPM 80,77 masuk kategori “sangat tinggi” dengan pertumbuhan sebesar 0,54 persen dari tahun 2018.
2. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen IPM yaitu:
 - Komponen kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup menjadi 73,19 tahun di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,16 tahun (tumbuh 0,04 persen)
 - Komponen pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi 14,94 tahun (tumbuh 0,07 persen) dan rata-rata lama sekolah menjadi 11,51 tahun (tumbuh 0,79 persen) dibandingkan tahun 2018
 - Komponen ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan menjadi 14,09 juta rupiah per tahun pada tahun 2019 (tumbuh 3,03 persen) dibandingkan tahun 2018.
3. Selama lima tahun terakhir Kota Palangka Raya meraih IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kota Palangka Raya meraih posisi tertinggi di Kalimantan Tengah pada semua dimensi pembentuk IPM (dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, ataupun dimensi hidup layak).

Dengan kondisi pembangunan manusia yang telah cukup baik, baik dari dimensi kesehatan, pendidikan, maupun daya beli, beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya untuk terus dapat mempertahankan kondisi yang telah dicapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga bayi dan balita agar terhindar dari kondisi *stunting*.

- 
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia Palangka Raya terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Dalam regional Kalimantan Tengah sumber daya manusia Palangka Raya dapat dikatakan unggul, tetapi secara nasional kabupaten/ kota lain di Indonesia terus berbenah dalam membangun sumber daya manusia.

▶ LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)

Prov/Kab/Kota	AHH				
	2015	2016	2017	2018	2019
KALIMANTAN TENGAH	69,54	69,57	69,59	69,64	69,69
Kotawaringin Barat	70,07	70,21	70,34	70,43	70,51
Kotawaringin Timur	69,51	69,60	69,70	69,75	69,80
Kapuas	68,40	68,49	68,59	68,64	68,69
Barito Selatan	66,48	66,63	66,78	66,89	66,99
Barito Utara	71,01	71,26	71,27	71,28	71,29
Sukamara	71,24	71,32	71,41	71,45	71,49
Lamandau	69,12	69,20	69,28	69,31	69,34
Seruyan	68,88	69,22	69,23	69,24	69,25
Katingan	65,28	65,40	65,53	65,62	65,70
Pulang Pisau	67,64	67,75	67,86	67,92	67,98
Gunung Mas	69,89	70,02	70,15	70,24	70,32
Barito Timur	67,71	67,84	67,97	68,06	68,14
Murung Raya	69,21	69,30	69,39	69,43	69,47
Kota Palangka Raya	72,97	73,05	73,13	73,16	73,19

**LAMPIRAN 2. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)**

Prov/Kab/Kota	HLS				
	2015	2016	2017	2018	2019
KALIMANTAN TENGAH	12,22	12,33	12,45	12,55	12,57
Kotawaringin Barat	12,13	12,42	12,69	12,70	12,71
Kotawaringin Timur	12,05	12,21	12,59	12,68	12,69
Kapuas	11,64	11,92	12,25	12,54	12,90
Barito Selatan	11,99	12,30	12,31	12,53	12,54
Barito Utara	11,50	11,96	12,38	12,40	12,48
Sukamara	11,55	11,97	11,98	12,10	12,11
Lamandau	12,43	12,44	12,45	12,46	12,47
Seruyan	11,56	11,61	11,62	11,97	11,98
Katingan	12,03	12,19	12,20	12,21	12,51
Pulang Pisau	12,16	12,32	12,38	12,39	12,40
Gunung Mas	11,44	11,74	11,75	11,76	11,77
Barito Timur	12,31	12,79	12,80	12,81	12,82
Murung Raya	11,69	11,71	11,72	11,73	11,74
Kota Palangka Raya	14,90	14,91	14,92	14,93	14,94

LAMPIRAN 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)

Prov/Kab/Kota	RLS				
	2015	2016	2017	2018	2019
KALIMANTAN TENGAH	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51
Kotawaringin Barat	8,01	8,05	8,35	8,36	8,41
Kotawaringin Timur	7,70	7,88	7,89	7,90	8,12
Kapuas	6,94	7,09	7,50	7,51	7,52
Barito Selatan	8,59	8,60	8,67	8,69	8,71
Barito Utara	8,33	8,34	8,35	8,59	8,60
Sukamara	7,81	7,82	7,83	7,84	7,91
Lamandau	7,68	7,79	7,94	7,95	8,38
Seruyan	7,45	7,49	7,75	7,76	7,93
Katingan	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66
Pulang Pisau	7,59	7,66	7,67	7,70	8,08
Gunung Mas	8,93	8,94	8,96	8,97	9,03
Barito Timur	9,02	9,03	9,04	9,05	9,20
Murung Raya	7,36	7,37	7,38	7,45	7,46
Kota Palangka Raya	10,74	11,02	11,03	11,42	11,51

LAMPIRAN 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (ribu Rupiah)

Prov/Kab/Kota	PENGELUARAN				
	2015	2016	2017	2018	2019
KALIMANTAN TENGAH	9 809	10 155	10 492	10 931	11 236
Kotawaringin Barat	11 979	12 101	12 420	12 788	13 175
Kotawaringin Timur	10 525	10 922	11 249	11 556	11 905
Kapuas	9 894	10 287	10 421	10 738	11 063
Barito Selatan	10 570	10 938	11 031	11 242	11 582
Barito Utara	8 534	8 774	9 067	9 357	10 010
Sukamara	7 709	7 792	8 177	8 482	8 738
Lamandau	9 999	10 049	10 455	10 996	11 278
Seruyan	8 026	8 331	8 658	9 110	9 385
Katingan	9 599	9 969	10 029	10 327	10 639
Pulang Pisau	8 639	9 017	9 365	9 807	10 104
Gunung Mas	10 044	10 155	10 276	10 504	10 822
Barito Timur	10 570	10 631	10 808	11 000	11 333
Murung Raya	9 328	9 742	9 872	10 164	10 471
Kota Palangka Raya	12 629	12 899	13 435	13 677	14 091

LAMPIRAN 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 (Tahun)

Prov/Kab/Kota	IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
KALIMANTAN TENGAH	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91
Kotawaringin Barat	70,60	71,13	72,11	72,46	72,85
Kotawaringin Timur	68,61	69,42	70,17	70,56	71,16
Kapuas	66,07	66,98	68,04	68,68	69,38
Barito Selatan	68,27	69,00	69,25	69,73	70,10
Barito Utara	67,38	68,28	69,07	69,72	70,52
Sukamara	65,80	66,40	66,98	67,52	67,95
Lamandau	68,30	68,54	69,17	69,70	70,51
Seruyan	64,77	65,40	66,14	67,04	67,57
Katingan	66,81	67,41	67,56	67,91	68,55
Pulang Pisau	65,76	66,49	67,00	67,54	68,34
Gunung Mas	69,24	69,73	69,95	70,23	70,65
Barito Timur	69,71	70,33	70,57	70,82	71,34
Murung Raya	66,46	66,96	67,16	67,56	67,89
Kota Palangka Raya	78,62	79,21	79,69	80,34	80,77

LAMPIRAN 6. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Kategori/Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	320,3	350,2	368,6	405,6	447,4
B	Pertambangan dan Penggalian	139,7	164,5	191,3	218,1	239,7
C	Industri Pengolahan	1 253,9	1 419,5	1 589,7	1 713,9	1 818,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34,2	40,1	47,9	55,1	62,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,1	22,8	24,7	28,0	30,3
F	Konstruksi	1 222,2	1 455,8	1 651,9	1 835,2	2 020,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 895,3	2 176,8	2 466,0	2 890,8	3 259,9
H	Transportasi dan Pergudangan	939,6	1 091,4	1 267,4	1 514,8	1 720,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	521,5	626,0	723,9	808,2	903,2
J	Informasi dan Komunikasi	172,2	184,9	208,0	232,4	256,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	798,8	905,7	1 078,5	1 168,6	1 249,9
L	Real Estate	339,2	391,3	436,8	516,6	581,3
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi	7,6	8,7	10,1	11,6	13,2
O	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 630,4	2 788,9	3 135,5	3 582,6	3 927,8
P	Jasa Pendidikan	606,9	708,9	806,7	944,5	1 046,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255,2	302,5	349,3	405,5	454,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	132,5	155,0	175,7	201,0	227,6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11 289,3	12 792,9	14 532,1	16 532,5	18 258,6

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 7. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen)

Kategori/Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,84	2,74	2,54	2,45	2,45
B	Pertambangan dan Penggalan	1,24	1,29	1,32	1,32	1,31
C	Industri Pengolahan	11,11	11,10	10,94	10,37	9,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,31	0,33	0,33	0,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
F	Konstruksi	10,83	11,38	11,37	11,10	11,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,79	17,02	16,97	17,49	17,85
H	Transportasi dan Pergudangan	8,32	8,53	8,72	9,16	9,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,62	4,89	4,98	4,89	4,95
J	Informasi dan Komunikasi	1,52	1,45	1,43	1,41	1,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,08	7,08	7,42	7,07	6,85
L	Real Estate	3,00	3,06	3,01	3,12	3,18
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
O	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,30	21,80	21,58	21,67	21,51
P	Jasa Pendidikan	5,38	5,54	5,55	5,71	5,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,36	2,40	2,45	2,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,17	1,21	1,21	1,22	1,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

